

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Wilayah Timur Tengah telah lama dianggap sebagai salah satu wilayah yang selalu berkonflik di dunia. Berbagai kejadian mulai dari konflik internal suatu negara, konflik antar negara di kawasan hingga konflik yang melibatkan negara-negara luar yang memiliki kepentingan, menjadikan setiap persoalan yang muncul di sana menjadi isu internasional yang sulit dicari penyelesaian masalahnya. Salah satu konflik berkepanjangan yang terjadi di Timur Tengah, yang hingga saat ini masih berlangsung selain konflik Arab-Israel adalah konflik yang terjadi di Suriah. Pada awalnya konflik yang berlangsung ini merupakan konflik internal negara itu sendiri, namun lama kelamaan menjadi perhatian dunia internasional karena konflik tersebut semakin membara dan memakan banyak korban.

Ditinjau dari sejarah, Suriah berasal dari salah satu wilayah yang dulunya disebut sebagai “*Greater Syria*” yang membentang sepanjang Laut Mediterania, Mesir, hingga Turki Selatan. Pada waktu itu, jika dibandingkan dengan saat ini, wilayah tersebut sebesar wilayah Israel, Lebanon, Suriah, Yordania dan sebagian kecil dari wilayah Turki yang berdampingan dengan perbatasan Suriah¹.

¹ Monte Palmer. 2007. *The Politics of Middle East*, Second Edition. Kanada: Thomson Wadsworth. Hal. 146-147.



Gambar 1.1 Peta Suriah
 Sumber: http://mikeely.files.wordpress.com/2011/05/syria_map.jpg

Setelah kaum muslim Arab menaklukkan Suriah pada abad 636 Masehi, sebagian besar populasi Suriah adalah muslim. Pada tahun 1516 Suriah menjadi bagian dari Kekaisaran Ottoman. Pemerintahan Ottoman bertahan hingga Revolusi Arab pada Perang Dunia I. Selanjutnya Suriah jatuh kedalam kekuasaan Prancis, pada saat itu Prancis menguasai Suriah dan juga Lebanon. Hingga pada akhirnya ditengah pergolakan Perang Dunia II, Prancis setuju pada kemerdekaan Suriah pada tahun 1941².

Syria atau Suriah setelah merdeka, merupakan sebuah negara yang selama berpuluh-puluh tahun terkoyak oleh berbagai macam pertentangan di antara kekuatan-kekuatan internal negara. Sejak kemerdekaannya kondisi Suriah tidak

² *Ibid.* Hal. 147.

pernah stabil. Intervensi militer dalam bidang politik tidak mampu meredam pertentangan antar golongan di negara tersebut³.

Ketenangan politik di Suriah baru dapat dirasakan pada tahun 1969, sejak Hafez Al-Assad menjadi perdana menteri merangkap menteri pertahanan Suriah, yang selanjutnya mengambil alih kekuasaan kepresidenan pada tahun 1971.

Tahun 1973, Suriah mengalami kekecewaan yang luar biasa. Saat itu Suriah terlibat Perang Yon Kippur dengan Israel, yang mengakibatkan Suriah harus kehilangan Dataran Tinggi Golan. Sejak kekalahannya dalam Perang Yon Kippur, Suriah mulai memperkuat pasukan militernya melalui program kerjasama akselerasi pembangunan angkatan bersenjata dengan Uni Soviet. Hal tersebut dibuktikan dengan ditandatanganinya *Treaty of Friendship Cooperation* yang berisi kesepakatan kerjasama dalam jual-beli peralatan perang mutakhir bagi keperluan angkatan bersenjata Suriah oleh Uni Soviet. Selain memperkuat angkatan bersenjatanya secara teknologi, secara personil jumlah militernya juga ditambah. Dengan adanya aliansi strategi antara Suriah dan Uni Soviet, Suriah dapat mengurangi superioritas Israel di kawasan Timur Tengah, serta mampu tampil sebagai salah satu negara Arab yang memiliki posisi tawar dalam menentukan upaya perdamaian di Timur Tengah⁴.

Namun kini, setelah Hafez Al-Assad wafat dan pemerintahan Suriah digantikan oleh anaknya Bashar Al-Assad sejak tahun 2000, Suriah kembali

³ Bantarto Bandoro, 1991, *Timur Tengah Pasca Perang Teluk*, California: *Centre for Strategic and International Studies*, Hal. 8

⁴ *Ibid.* Hal 10-11

mengalami pergolakan internal. Pergolakan internal ini terjadi karena rakyat Suriah menuntut mundur Bashar Al-Assad dan menentang pemerintahannya. Dalam pertentangan tersebut, telah banyak korban jiwa yang berjatuh sehingga konflik internal Suriah ini menjadi perhatian dunia internasional dan melibatkan Perserikatan Bangsa-Bangsa, khususnya Dewan Keamanannya.

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai organisasi internasional memiliki fungsi utama yakni menjaga keamanan dan perdamaian dunia termasuk melakukan berbagai operasi, pembentukan sanksi internasional, serta untuk melaksanakan tindakan militer. Dalam konflik yang terjadi di Suriah ini, sudah sepantasnya Dewan Keamanan PBB turut campur tangan, konflik yang terjadi di Suriah telah mengganggu ketenangan dunia, terbukti dengan banyaknya korban nyawa dan kecaman dari negara-negara lain untuk segera mengganti pemimpin di Suriah. Dalam hal ini, Dewan Keamanan berhak untuk mengeluarkan resolusi yang bersifat mengikat bagi para anggota PBB, termasuk Suriah maupun negara-negara lainnya. Resolusi tersebut biasa disebut sebagai *Security Council Resolution*, sesuai dengan Pasal 25 *United Nations Charter* setiap negara anggota PBB harus tunduk kepada resolusi tersebut. Namun beberapa resolusi yang dihasilkan tersebut di veto oleh Rusia dan Cina. Tindakan veto kedua negara tersebut telah menggagalkan Dewan Keamanan PBB dalam mencapai suatu resolusi untuk mengambil tindakan dalam konflik yang terjadi di Suriah.

Berdasarkan hal-hal yang telah dipaparkan di atas, penulis tertarik untuk meneliti mengenai kegagalan Perserikatan Bangsa-Bangsa, khususnya Dewan

Keamanan dalam menyelesaikan konflik di Suriah dan mengapa Dewan Keamanan tersebut harus turut campur tangan dalam konflik internal yang dialami oleh Suriah. Oleh karena itu, penulis mengajukan penelitian dengan judul:

“Kegagalan Dewan Keamanan PBB Mengatasi Konflik Internal di Suriah pada Masa Pemerintahan Presiden Bashar Al-Assad Periode 2000-2011”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka masalah dalam penelitian yang akan penulis lakukan adalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa saja yang mendorong Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa turut mengintervensi konflik di Suriah pada masa pemerintahan Presiden Bashar Al-Assad periode 2000-2011?
2. Apa yang membuat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengalami kegagalan dalam membantu penyelesaian konflik di Suriah selama masa pemerintahan Presiden Bashar Al-Assad periode 2000-2011?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya, maka tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mendorong Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa turut mengintervensi konflik di Suriah pada masa pemerintahan Presiden Bashar Al-Assad periode 2000-2011.

2. Untuk mengetahui penyebab kegagalan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam mengatasi konflik di Suriah selama masa pemerintahan Presiden Bashar Al-Assad periode 2000-2011.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap ilmu Hubungan Internasional atau secara spesifik mengenai peranan organisasi internasional, yang dalam hal ini adalah Dewan Keamanan PBB, yang pada kenyataannya turut ambil bagian dalam perannya menjaga perdamaian dunia, termasuk Suriah.

Selain itu, penelitian ini juga kiranya dapat bermanfaat sebagai sumber informasi tambahan bagi mahasiswa maupun kaum akademisi lainnya yang akan melakukan penelitian serupa, sehingga penelitian ini pun dapat lebih dikembangkan dan diperdalam pada masa mendatang.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis yang diharapkan dapat dicapai setelah melakukan penelitian ini adalah kiranya dapat diketahui bahwa peran organisasi nasional juga tidak kalah pentingnya dalam menjaga kedamaian di suatu negara dan sekaligus dapat menjadi pihak penengah dalam berbagai konflik yang terjadi. Berknaan dengan hal ini pula, penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam memberi tanggapan untuk

selalu menerima dengan tangan terbuka pihak-pihak asing yang ingin turut membantu dalam penyelesaian konflik internal suatu negara tersebut.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika dibuat agar penulisan tugas akhir lebih mudah dan sistematis, sehingga mengarah pada titik permasalahan. Jika seluruh tahapan penelitian ini telah selesai, maka laporannya akan ditulis secara utuh menjadi sebuah karya ilmiah. Sistematika penulisan yang digunakan disusun berdasarkan pembagian beberapa bab sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, maksud dan tujuan, kerangka pemikiran dan hipotesis, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II KERANGKA BERPIKIR

Bab ini berisi uraian tentang definisi konseptual dan teori-teori yang relevan dengan masalah yang akan diteliti, selain itu juga terdapat tinjauan pustaka.

Bab III METODE PENELITIAN

Berisi mengenai uraian atau deskripsi dari obyek penelitian, pendekatan metodik, teknik mencari data, teknik analisis data, dan hal-hal lain yang terkait dengan penelitian.

Bab IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisi bagaimana hubungan antar variabel, paparan hasil penelitian dan juga pembahasan lebih lanjut mengenai hasil yang diperoleh dari penelitian mengenai kegagalan Dewan Keamanan PBB dalam penyelesaian konflik di Suriah pada masa Presiden Bashar Al-Assad periode 2000-2011.

Bab V PENUTUP

Berisi kesimpulan hasil analisa yang telah dilakukan. Pada bagian ini juga diajukan saran bagi para peneliti selanjutnya yang memiliki minat mempelajari studi politik luar negeri khususnya mengenai kegagalan Dewan Keamanan PBB dalam mengatasi berbagai konflik yang ada di Timur Tengah, khususnya Suriah.

KEPUSTAKAAN

Berisi uraian daftar pustaka, daftar dari literatur-literatur yang peneliti gunakan sebagai data dalam penulisan karya ilmiah.